

VOL. I. No. 02 February 2006

ISSN : 1858 - 3253

WACANA STIE-GANDHI

JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS

Pengaruh eksternal (Tingkat Inflasi di Amerika Serikat) terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara ASEAN

Aloysius Deno Hervino

Analisis faktor-faktor yang berpengaruh dan ketergantungan terhadap impor dalam pembangunan ekonomi di propinsi Nusa Tenggara Timur

Eduardus Hena, SE., MSi

Pengaruh beberapa variabel makro ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Margaretha Sumaryati dan Aloysius Deno Hervino

Analisis optimalisasi produksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan kawat las tipe KS-R pada PT. XYZ di Cikarang -Bekasi

Tessy Silvana FoEh

Organizational development management of change

Prof. Michael J. Goodwin, MBA

Masalah sosial ekonomi dalam management hutan produksi di Indonesia

John FoEh, Dr. Ir. M.Sc

STIE GANDHI

Jl. Pasar Baru Selatan No. 10, JAKARTA PUSAT 10710

Telp.: 021-345 5937-38, Fax : 021-380 3166

e-mail : stie-gandhi@gibt.ac.id

WACANA STIE-GANDHI

JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengaruh eksternal (tingkat Inflasi di Amerika Serikat) terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara ASEAN <i>Aloysius Deno Hervino</i>	1 - 8
Analisis faktor-faktor yang berpengaruh dan ketergantungan terhadap impor dalam pembangunan ekonomi di propinsi Nusa Tenggara Timur <i>Eduardus Hena, SE.,MSi</i>	9 - 16
Pengaruh beberapa variable makro ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia <i>Margaretha Sumaryati dan Aloysius Deno Hervino</i>	17 - 26
Analisis optimalisasi produksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan Kawat las tipe KS-R pada PT. XZY di Cikarang Bekasi <i>Tessy Silvana FoEh</i>	27 - 46
Organizational development management of change <i>Prof. Michael J. Goodwin, MBA</i>	47 - 52
Masalah Sosial Ekonomi dalam Manajemen Hutan Produksi di Indonesia <i>John E.H.J. FoEh, Dr.Ir.MSc</i>	53 - 62

MASALAH SOSIAL EKONOMI DALAM MANAJEMEN HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA

John E.H.J. FoEh

ABSTRACT

The main principle of production forest management is to apply the maximum and sustainable yield concept. Many problem was happened since the forest exploitation on a large scale took place during New Regime of Indonesia Government. At the moment, this activity was for the devise and it placed forest products as devise resources after natural gas and petrol. This problems started from areas where the forest borderlines were overlapping with other land use. At the same time, timber production and industries were run very unefficiently. Shifting cultivation forest plantation in one side were not significantly success. As a result, ecolabeling stamp must be given to forest products from Indonesia for export destination. In other side, with regard to the forest land-use, there are still controversy between common property principle adopted by local people versus conservation efforts, included other institutional problems in forest management. Today, again, forest still the principle resource for the development of regional autonomy concept, and this will be another way to the destruction of forest resources. Efforts are needed to push the implementation of five priority programs of the Ministry of Forest in order to achieve the maximum and sustained yield principle in production forest management.

Key words : *Forest Management, Production Forest, Common Property, Maximum and Sustained Yield Principle, Regional Autonomy*

1. PENDAHULUAN

Pertanyaan paling mendasar saat ini adalah apakah Hutan Produksi Indonesia masih tetap menjadi sumber devisa bagi negara? Selanjutnya, sesuai dengan UUD 1945, apakah benar bahwa sumberdaya alam ini telah diusahakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Pengusahaan hutan produksi¹ pada dasarnya mengikuti kaidah-kaidah *ekonomi produksi*. Produksi komoditi hasil hutan dipengaruhi oleh banyak variabel, baik yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia dan teknologi maupun yang dapat dimanipulasi untuk memaksimalkan tujuan manusia (*maximising benefit*).

Pada dasarnya, pengelolaan sumberdaya hutan tidak dapat lepas dengan kepentingan umum. Manajemen hutan produksi harus mentaati prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian maka, sistem pengusahaan hutan produksi dalam tulisan ini, mengacu pada semua aspek yang terkait dengan pentingnya sumberdaya hutan baik aspek fisik kawasan dan sumber-sumber yang ada di dalamnya, serta aspek sosial-ekonomi dan institusi.

¹ Konteks pembahasan hanya pada hutan produksi yang status, ciri, persyaratan dan peluang yang melekat pada kawasan tersebut, berbeda dengan kawasan hutan dengan fungsi lainnya.

2. ARAH PENGUSAHAAN HUTAN YANG DIINGINKAN

Sejarah pemanfaatan sumberdaya alam di dunia ini, dimulai dengan pemanfaatan hutan dan sesungguhnya sejak itu tindakan dimaksud adalah pionir dalam penerapan prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya serbaguna dan lestari (*sustainable and multiple output resource management principle*). Sejak lama arah pengusahaan hutan telah menjadi isu dunia yang dapat terlihat dari tema-tema yang dipakai dalam berbagai kongres kehutanan sedunia antara lain; "*Forest for Community Development*", "*Forest for People*", "*Forest a Heritage for the Future*" dan seterusnya. Namun perbedaan pendapat justru umumnya bersumber pada peluang yang ada pada manfaat serbaguna (*multiple-outputs*) yang terdapat dalam prinsip manajemen hutan itu sendiri. Jika pengusahaan hutan bertujuan hanya sekedar memaksimalkan manfaat-manfaat (*maximizing benefits*), lalu timbul pertanyaan "*memaksimalkan apa dan untuk siapa?*". Mungkin jawaban yang tepat adalah "*konsep penggunaan sumberdaya hutan yang bijaksana*", tetapi kemudian dihadapkan pada pertanyaan yang lain; "*bijaksana menurut kepentingan siapa?*". Kalau dilihat dari aspek industri hasil hutan, maka penggunaan yang bijaksana adalah untuk mendapatkan kayu yang optimal, namun dari sisi ekologis maka pemanfaatan hutan yang bijaksana ini lebih ditekankan sebagai sumber plasma nutfah (*genetic source*) dan perlindungan lingkungan hidup.

Pandangan tentang arah pengusahaan hutan produksi terutama dari hutan alam yang hampir habis ini, terus merembet ke masalah konservasi dan terus bergerak kepada masalah politik perdagangan. Hal terakhir ini terlihat dari adanya penerapan "*ecolabelling*" dalam perdagangan hasil hutan, atau penerapan label pada produk hasil hutan untuk mendapatkan jaminan bahwa hasil tersebut diperoleh dari pengelolaan hutan produksi yang lestari. Sumber perbedaan pendapat tentang benefit apa yang dapat diperoleh dari hutan adalah adanya dua prinsip yang belakangan ini makin seru diperdebatkan.

1. Prinsip pertama yaitu kelestarian manfaat ganda atau "*sustained yield-multiple-outputs*" dimana kebijakan ini bertolak dari upaya pemenuhan permintaan optimal (*optimal demand*) terhadap barang dan jasa hasil hutan.
2. Prinsip yang kedua adalah pemanfaatan multiguna dari sumberdaya hutan secara lestari atau "*sustainable multiple-use of forest resources*" dimana kebijakan tersebut harus tergantung pada kemampuan optimal sumberdaya hutan untuk berfungsi ganda.

Fungsi ganda hutan berlaku bagi semua hutan yaitu; fungsi lindung, fungsi produksi, fungsi rekreasi, fungsi konservasi, namun tekanannya didasarkan atas peruntukkan menurut undang-undang. Pergeseran prioritas pengelolaan hutan produksi memang terjadi dari produksi Kayu (timber) ke Non Kayu (non-timber) dan kepentingan ekologis. Namun di banyak negara berkembang, kepentingan pembangunan ekonomi masih menjadi tuntutan pokok dalam pemanfaatan/pengusahaan sumberdaya hutannya sehingga pada kenyataannya kepentingan ekologis dan lingkungan menjadi kurang mendapat perhatian yang serius.

Hal ini menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, termasuk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia sejak penerapan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Adanya wewenang tertentu dari Pemerintah Kabupaten dan Kota terhadap SDA di daerahnya menyebabkan makin merosotnya kualitas lingkungan hutan yang ada saat ini. Hal ini dapat terlihat dari maraknya upaya penebangan hutan serta perdagangan liar hasil hutan (*illegal logging*) sehingga Presiden RI harus mengeluarkan kebijakan khusus untuk penanggulangannya. Suatu fakta bahwa mekanisme pengawasan yang kini menjadi kewenangan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan dari otonomi daerah itu sendiri.

**MASALAH SOSIAL EKONOMI DALAM MANAJEMEN
HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA**
(John E.H.J. FoEh¹)

Hasil UNCED/KTT bumi 1992², telah mengambil konsensus untuk mengkompromikan kedua pandangan tersebut misalnya dalam "*principles of forest, a global Concensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All types of Forest*". Pada elemen dasar butir 2b dinyatakan : "sumberdaya hutan dan lahan hutan harus dikelola secara lestari untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, ekologi, budaya dan spiritual umat manusia pada saat sekarang dan pada masa yang akan datang. Kebutuhan ini meliputi hasil hutan dan jasa hutan seperti kayu dan non kayu, air, makanan, obat-obatan, kayu bakar, perlindungan, pekerjaan, rekreasi, tempat tinggal, habitat untuk kehidupan liar, keanekaragaman lansekap, carbon sink dan reservoir serta jasa hutan lainnya". Dalam butir enam 6c, ditegaskan kembali, "keputusan yang diambil dalam hal pengelolaan, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan atas sumberdaya hutan, haruslah sedapat mungkin berdasarkan telaah yang menyeluruh atas nilai-nilai ekonomi dan non ekonomi hasil hutan maupun jasa hutan dan mempertimbangkan biaya serta manfaat lingkungan hidup".

Dalam sistem pengusahaan hutan, khususnya hutan produksi, diperlukan instrumen kebijakan pemerintah untuk menghubungkan antara pemilik sumberdaya (negara), pelaksana/pengusaha (BUMN, BUMD, Swasta) dan sumberdaya hutannya sendiri maupun kegiatan pemanfaatannya. Instrumen tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Komponen lain yang besar perannya dalam sistem ini adalah pasar atau konsumen baik dalam negeri maupun ekspor. Pada kenyataannya, komoditi kayu dari Indonesia banyak tergantung pada pasar ekspor (external) yang volume dan harganya lebih tinggi dari pada pasar dalam negeri. Isu tentang pencabutan larangan ekspor kayu bulat, pajak kayu olahan, distribusi pendapatan dari sumber (economic rent), sampai kepada *illegal logging*, harus menjadi sorotan tajam dalam sistem pengelolaan hutan saat ini.

Komponen berikutnya adalah kegiatan pemanenan (harvesting) dan pasca panen (pengolahan) pada sumberdaya baik alami (hutan primer) maupun buatan (hutan tanaman / HTI). Dalam komponen ini dipersyaratkan keseimbangan antara kemampuan produksi hutan yang terukur dari riap hutan (*wood annuallly increment*), panen dan pasar yang berkesinambungan, yaitu dari sumber ke pasar dan sebaliknya dari pasar ke sumber melalui kegiatan industri dan pemanenan hasil hutan. Pemantapan sistem pengusahaan hutan haruslah dimulai pada sisi yang paling lemah dahulu, yaitu hutan alam yang terancam punah dan hutan tanaman (HTI) yang tak kunjung berhasil. Hal ini perlu ditekankan karena kegiatan pada sumberdaya hutan banyak menyangkut kepentingan umum dan jangka panjang yang justru saat ini kurang disadari atau mungkin sengaja tidak dipedulikan oleh daerah-daerah yang memiliki hutan karena mengejar target PAD.

3. MASALAH KAWASAN HUTAN

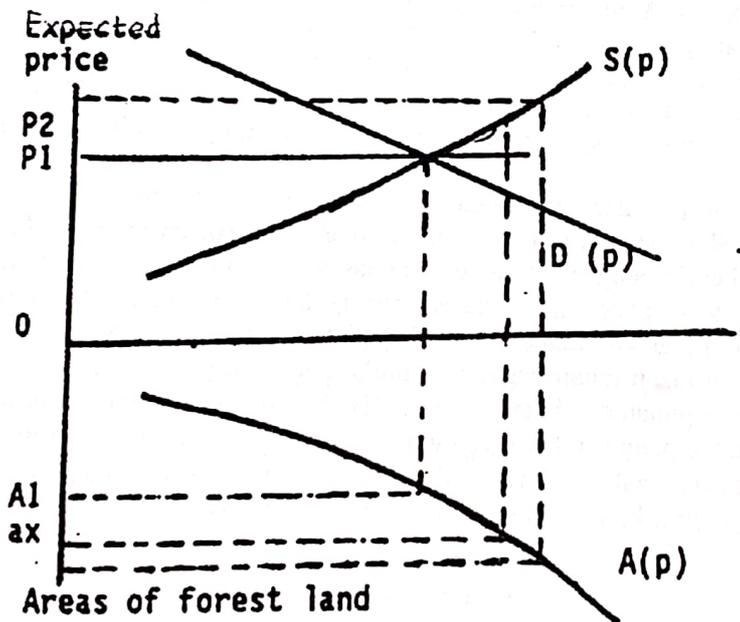
Sejalan dengan penerapan prinsip kelestarian hasil dalam pengelolaan hutan produksi maka lahan (kawasan) hutan bukan lagi sekedar faktor produksi melainkan perlu dipandang sebagai suatu asset (capital) terutama bila menyangkut kepentingan banyak orang dan generasi di masa depan. Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, status kepemilikan lahan masih belum mantap, baik dari segi hukum maupun batas-batas di lapangan sehingga seringkali pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan kelestarian sulit dilaksanakan, terutama berkaitan dengan tumpang-tindih fungsi lahan dan peruntukannya.

Kawasan hutan alam tropis di luar Jawa hingga kini masih mengandung ciri milik umum (*common property*) meskipun pemerintah melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) maupun Tata Ruang Wilayah, berupaya agar status lahan hutan produksi dapat dihormati. Keadaan ini lebih terasa mendesak pada kawasan yang mendapat tekanan pertumbuhan penduduk dan industri yang

² UNCED, *Principles of Forest Management*, Earth Summit, Rio de Janeiro, 1992. P 56-60

tak terkendali. Di mata masyarakat dunia, justru masalah ini menjadi sumber ketidakpercayaan akan terjaminnya kelestarian hutan tropis. Pembangunan hutan dengan status lahan yang menyandang ciri milik umum akan selalu menderita kerusakan atau penggundulan hutan. Organisasi Internasional Kayu Tropis (ITTO) dalam Sudradjat⁴ mempersyaratkan pemantapan kawasan hutan sebagai suatu perkebunan permanen atau "permanent estate" agar kelestarian hutan lebih terjamin.

Menurut Hyde, 1990 dalam Soemitro, 1992⁵, secara finansial, penggunaan lahan yang terbaik adalah bila digunakan untuk nilai penghasilan yang tertinggi (*the best land and highest value use*). Perlu dipertimbangkan juga nilai penghasilan tinggi jangka pendek dan jangka panjang, dimana hutan produksi pada kenyataannya selalu menjadi korban suku bunga tinggi, karena jangka waktu produksi yang lama. Pada hakekatnya, ada sesuatu yang dapat menambah *value-use* dari hutan produksi yaitu jasa lingkungan dari ekosistem yang lebih alami antara lain: konservasi tanah dan air, habitat yang lebih baik untuk beberapa flora dan fauna. Namun andaikan ini dipertimbangkan, "the higher value use" atas tambahan jasa lingkungan tersebut maka sukar dikuantifikasikan untuk menambah keunggulan hutan produksi. Kriteria fisik maupun finansial dalam alokasi lahan untuk sumberdaya hutan menurut model yang dibuat oleh Hyde (1990) dalam Soemitro (1992) disajikan pada diagram di bawah ini :



Keterangan :

- S(p) = Kurva supply tebangan tahunan, fungsi dari p (expected price)
- D(p) = Kurva demand hasil hutan
- A(p) = Kurva alokasi lahan hutan sebagai fungsi dari tebangan tahunan
- OAl = Lahan hutan produksi
- Ar = Lahan marginal
- Ax = Areal hutan yang dibangun ditinjau dari lahan marginal (Ar) maka perlu subsidi sebesar $P2 - P1$

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa pemantapan kawasan hutan produksi akan lebih terjamin bilamana harga lebih mantap dan makin tinggi. Ada surplus hasil usaha yang dikembalikan ke sumber untuk mempertahankan alokasi lahan sesuai dengan manfaat yang optimal. Bilamana hutan dibangun di kawasan marginal (tidak produktif,

**MASALAH SOSIAL EKONOMI DALAM MANAJEMEN
HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA
(John E.H.J. FoEh¹)**

lahan kosong dan kritis) maka perlu subsidi untuk merehabilitasinya agar dapat menjadi lebih kompetitif (P2 – P1).

Sebagai gambaran yang utuh mengenai kawasan hutan di Indonesia saat ini, maka sesuai dengan berlakunya UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, luas kawasan hutan hasil pemadu-serasian antara TGHK dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan berdasarkan hasil pemadu-serasian TGHK & RUTRW

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	%
1.	Hutan Suaka Alam/ Hutan Pelestarian Alam (HAS/HPA)	20.500.988	17,03
2.	Hutan Lindung (HL)	33.519.600	27,85
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	23.057.449	19,16
4.	Hutan Produksi (HP)	35.197.011	29,24
5.	Hutan Produksi yang dikonversi (HPK)	8.078.056	6,72
	JUMLAH	120.353.104	100

Sumber : Statistik Kehutanan dan Perkebunan Indonesia Tahun 2000.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk memberikan kepastian hukum, hasil pemadu-serasian ini serta memperhatikan hasil-hasil penataan batas yang telah dilakukan, maka Menteri Kehutanan telah menerbitkan Penunjukkan Kawasan Hutan Propinsi. Jika dilihat data pada Tabel 1, tampaknya masih terdapat cukup luas kawasan hutan di Indonesia. Namun untuk mengetahui sejauh mana kondisi dari lahan hutan dimaksud maka pada Tabel 2 disajikan data kondisi penutupan lahan pada sebagian hutan produksi di Indonesia.

Tabel 2. Penutupan lahan pada sebagian Hutan Produksi

	Kondisi Penutupan Lahan	Areal HPH		Areal Ex-HPH		Jumlah	
		Luas (juta ha)	(%)	Luas (juta ha)	(%)	Luas (juta ha)	(%)
1.	Hutan Primer	18,3	45	0,6	11	18,9	40
2.	Hutan Sekunder	11,1	27	2,5	44	13,6	30
3.	Tidak berhutan (tanah kosong, pertanian, dll)	11,7	28	2,6	45	14,3	3
		41,1	100	5,7	100	46,8	100

Sumber : Badan Planologi Kehutanan, 2001³

Data pada Tabel 2, jika dibandingkan dengan Tabel 1, dapat diketahui gambaran tingkat kerusakan hutan produksi, terutama pada areal HPH yang telah berakhir masa konsesinya.

³ Untung Iskandar, 2001. Potret Hutan Indonesia, BPK, Dephut, Jakarta. P.7

Areal bekas HPH saat ini penanganannya dilakukan oleh PT. Inhutani I – IV yaitu hutan primer yang tersisa seluas 0,6 juta ha atau 11 % dari seluruh areal ex-HPH seluas 5,7 juta ha.

4. DAMPAK SOSIAL EKONOMI

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan industri hasil-hasil SDA selalu memberikan dampak yang positif maupun negatif pada masyarakat, wilayah dan lingkungan sekitar atau lingkungan lain yang masih terpengaruh meskipun letaknya jauh. Pemanfaatan sumberdaya hutan alam produksi mempunyai kaitan yang lebih erat dalam aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar, dibanding dengan kegiatan ekonomi lain (pertambangan, perkebunan dan lain-lain).

Kaitan tersebut berupa ketergantungan kehidupan penduduk dengan keberadaan hutan yang besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya alternatif sumber kehidupannya kayu untuk industri. Diharapkan bahwa dampak pemanfaatan sumberdaya hutan berupa tersedianya kayu untuk industri dapat memberikan dampak positif dan merupakan suatu alternatif manfaat hutan dan lahan hutan yang paling baik bagi penduduk setempat.

Menurut Gregory, (2001)⁴, umumnya dampak positif yang diharapkan dari kegiatan pengusahaan hutan produksi bagi penduduk yang kehidupannya bergantung pada hutan adalah sebagai berikut :

- Pendapatan atau kesempatan kerja dari kegiatan kehutanan
- Hasil hutan non kayu
- Kesejahteraan yang dibiayai dari hasil pengusahaan hutan
- Kesempatan bercocok tanam
- Fasilitas kredit dan pemasaran
- Pendidikan keterampilan
- Partisipasi dan keterlibatan dalam industri hasil hutan
- Sarana dan prasarana untuk kepentingan umum

Bila dampak positif yang diharapkan tersebut tidak terealisasi atau ternyata lebih kecil daripada kesempatan lain misalnya berladang (menebang dan membakar hutan), dan mencuri kayu maka akibatnya akan merugikan bagi pemerintah, pengusaha dan pada gilirannya kerugian bagi masyarakat setempat itu sendiri. Namun bilamana jumlah penduduk makin besar, dan kebutuhan hidup sejahtera makin meningkat, maka dampak positif dari pengusahaan hutan itu seringkali tidak dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat secara memadai.

Dampak positif pengusahaan hutan terhadap masyarakat sekitar (jarak tertentu terhadap batas hutan) dapat didekati secara kuantitatif. Sesuai dengan namanya, dampak ini (positif dan negatif) adalah di luar perhitungan "economic rent" yang berasal dari penjualan komoditi hasil hutan. Dampak secara kuantitatif tersebut disajikan dengan persamaan sebagai berikut (Bowes and Krutilla, 2002)⁸ :

$$D = \frac{N(Uh - UI) + EG + SP + SL + TP - KST - KL - KS}{ds}$$

⁴ Gregory, Robinson, G. 2001. Forest Resource Economics. John Wiley & Sons, New York. P 16

**MASALAH SOSIAL EKONOMI DALAM MANAJEMEN
HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA**
(John E.H.J. FoEh')

Dimana :

- N = Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di HPH
- Uh = Tingkat rata-rata per tahun tenaga kerja yang bekerja di HPH
- U_l = Tingkat upsh per tahun pekerjaan di luar HPH (lokal)
- EG = Efek ganda pendapatan dan kesempatan kerja yang ditimbulkan oleh kegiatan di HPH per tahun
- SP = Sumbangan HPH untuk pembangunan sarana prasarana disekitar HPH pertahun
- SL = Sumbangan langsung dari HPH untuk beban sosial penduduk disekitar pertahun
- TP = Transfer teknologi dan pendidikan/latihan kepada penduduk /tahun
- KST = Kehilangan sumber tradisional penduduk akibat adanya HPH pertahun
- KS = Kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial yang terjadi karena masuknya HPH Di wilayah itu perhutanan
- ds = Faktor diskon sosial akan arus dampak tahunan yang terjadi.

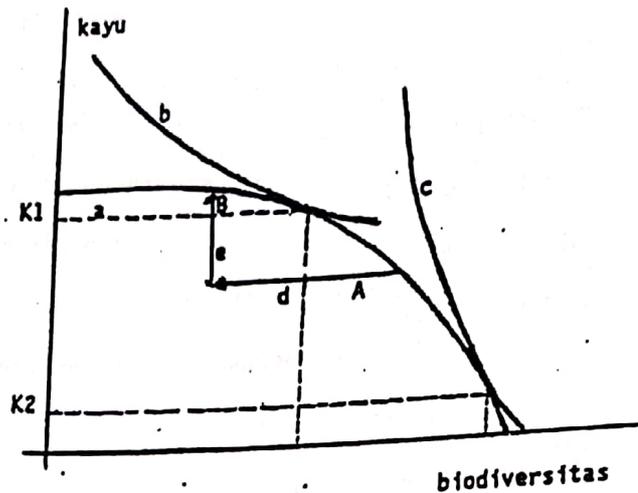
Dari persamaan simbol-simbol disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa bilamana jumlah totalnya positif, maka keadilan HPH di suatu tempat memang memberikan dampak yang baik meskipun masih tergantung pada besar kecilnya dampak tersebut. Ada lima tanda positif dan tiga tanda negatif pada persamaan itu sehingga untuk menjadikan dampak positif maka unsur-unsur negatif diupayakan mengecil. Dampak kesempatan kerja misalnya akan lebih positif bila perbedaan tingkat upah kerja dan yang ikut serta di HPH terjadi lebih tinggi dan lebih banyak.

Pada persamaan tersebut, dimasukkan unsur faktor diskon yang menunjukkan agar arus dampak tahunan tersebut dibuat bisa lestari tidak hanya berlangsung beberapa tahun saja. Kelestarian dampak positif yang diharapkan pada gilirannya tergantung pada kelestarian sumberdaya hutan yang bersangkutan.

5. ASPEK KONSERVASI PADA HUTAN PRODUKSI

Pada bagian awal telah diungkapkan adanya dua pandangan bahwa pemanfaatan sumberdaya hutan bertolak pada pasar (pemuahan kebutuhan) yaitu *multiple-output principle* dimana misalnya kawasan hutan untuk produksi kayu dapat dipisahkan dari kawasan hutan untuk jasa sumber plasma nutfah. Sebaliknya, pemanfaatan yang bertolak dari kemampuan ekologis secara utuh suatu kawasan sumberdaya hutan yaitu *multiple function of a forest resource*, maka kawasan hutan produksi kayu tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi hutan yang lain seperti konservasi sumber plasma nutfah.

Ciri fungsi ganda sumberdaya hutan ini dapat disajikan dalam diagram *joint-product* yang untuk sederhananya terdiri dari dua produk/jasa yaitu hasil kayu dan jasa plasma nutfah biodiversitas sbb:



Sumbu vertical diagram di atas adalah produksi kayu dari kawasan hutan produksi sedangkan sumbu horizontal adalah jumlah keaneka-ragaman spesies (biodiversitas) yang sama-sama dapat dihasilkan dengan kombinasi seperti digambarkan pada kurva a (*production possibility curve*). Hubungan produksi kayu dengan biodiversitas di hutan tropik basah agak unik yaitu kurva (a) yang tertelungkup artinya untuk peningkatan satu unit produksi kayu, bersaing dengan penurunan biodiversitas yang relatif lebih besar yang digambarkan dengan pergeseran titik A ke titik B dimana d jauh lebih besar dari pada e. Kurva b adalah kurva indeferent yang mencerminkan sikap negara berkembang yang lebih menghargai nilai tangible kayu dari pada kurva yang curam mencerminkan sikap masyarakat negara maju yang menilai bioversitas lebih berharga dari pada kayu dari kawasan sumberdaya hutan yang sama. Negara berkembang menghendaki tebangan pohon kayu sebesar K1 atau lebih sedangkan negara maju menghendaki hanya K2 atau tidak ada tebangan sama sekali. Secara global mungkin akan terjadi kompromi yang menghasilkan tebangan K1 dan K2 tergantung siapa yang lebih kuat.

5. ASPEK INSTITUSI

Terdapat sedikitnya tiga isu penting sehubungan dengan aspek institusi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan produksi yang meliputi :

- Kordinasi dan kewenangan sendiri
- Birokrasi dan privatisasi
- Profesionalisme dan hambatannya

Kehutanan sebagai salah satu sektor ekonomi dalam pembangunan, menunjang terselenggaranya koordinasi antara sektor dimaksud dengan tingkat dan kekuatan yang sama sehingga perhatian pada masalah kehutanan dapat lebih terjamin dan diperhitungkan. Di samping itu, koordinasi antara instansi yang mempunyai tingkatan yang sama akan lebih mudah atau lancar dilaksanakan. Namun dengan kuatnya suatu organisasi, terkadang lembaga termaksud berani berjalan sendiri dengan alasan kewenangan yang dimilikinya. Bila demikian halnya, akan menjauhkan koordinasi sedangkan partisipasi masyarakat misalnya dalam pembangunan kehutanan justru dimulai dari penerapan prinsip demokrasi dalam berbagai hal termasuk pengambilan

**MASALAH SOSIAL EKONOMI DALAM MANAJEMEN
HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA
(John E.H.J. FoEh¹)**

keputusan. Kecenderungan institusi moderen dewasa ini lebih banyak mengarah pada pengurangan peran pemerintah baik dalam perencanaan, pengawasan maupun pelaksanaan kegiatan produksi barang dan jasa untuk diserahkan kepada pihak swasta.

Peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan pelindung kepentingan umum dalam jangka panjang harusnya dibatasi pada kegiatan yang mengandung resiko tinggi, termasuk yang berkaitan dengan pengawasan masalah eksternalitas (*negative externalities*). Birokrasi dalam pengelolaan hutan produksi dapat memberi peluang terjadinya ketidak-berhasilan pekerjaan di lapangan. Seharusnya, perencanaan dan pengawasan HPH dilaksanakan oleh pihak swasta dengan persyaratan tenaga profesional kehutanan yang memadai dan berdedikasi tinggi. Tenaga profesional kehutanan di HPH memang sudah cukup banyak tetapi akan lebih baik lagi bila mereka diberi wewenang yang lebih luas sesuai dengan profesinya. Rekayasa manajemen sudah harus dilakukan agar tenaga profesional kehutanan memegang peranan lebih besar dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya hutan. Hal ini akan menyebabkan kepercayaan pihak investor menjadi lebih baik dan prinsip kerja saling menguntungkan dapat dijalankan dengan baik.

6. PENUTUP KEBIJAKAN YANG PERLU DITEMPUH

Permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi sektor kehutanan di era otonomi daerah kabupaten dan kota adalah; degradasi sumberdaya hutan (SDH), penyerobotan/klaim atas SDH, kekurangan pasokan bahan baku kayu bagi industri dalam negeri, pelaksanaan desentralisasi bidang kehutanan yang belum benar dengan kasus-kasus penyelundupan kayu yang berlangsung terus. Kondisi ini semakin diperparah dengan maraknya *illegal logging dan* kebakaran hutan. Permasalahan tersebut telah memunculkan tuntutan banyak pihak termasuk dunia internasional yang selayaknya segera diatasi dengan mencari akar permasalahan dari kasus-kasus yang muncul tersebut.

Ada 5 program prioritas yang telah dicanangkan pemerintah yaitu sebagai berikut :

- Pemberantasan penebangan liar (*Illegal logging*) dengan penerapan *law enforcement* yang tegas dan benar.
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan upaya pelaksanaan kebijakan *zero burning policy* dengan merumuskan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak termasuk Pemda Kota dan Kabupaten.
- Restrukturisasi industri sektor kehutanan dengan meningkatkan bahan baku lewat hutan tanaman industri serta peningkatan efisiensi produksi dan pengolahan hasil hutan.
- Pembangunan hutan tanaman yang tidak hanya dibiayai oleh dana reboisasi tapi juga oleh para investor swasta (PMA dan PMDN) termasuk oleh Koperasi dan Kelompok Tani Hutan.
- Otonomi daerah di bidang kehutanan sesuai dengan semua UU dan peraturan yang berkaitan dengan itu antara lain; UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, PP No. 25 tahun 2000 tentang rincian pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Pelaksanaan kelima program prioritas ini nampaknya mengalami berbagai hambatan terutama dalam hal penanganan *illegal logging*, penyelundupan kayu keluar negeri dan kebakaran hutan. Sementara itu, industri kehutanan telah berada pada kondisi sangat kekurangan bahan baku yang tidak mungkin diadakan melalui impor. Salah satu strategi yang mungkin ampuh dan sekaligus menjaga kelestarian hutan adalah memindahkan sektor kehutanan dari sektor ekonomi ke sektor KESRA. Sejalan dengan itu, untuk suatu periode tertentu, ekspor produk kayu dibatasi dan

diarahkan pada kepentingan pembangunan dalam negeri. Memang akan terjadi masalah dalam sumber devisa, namun apakah kita mementingkan devisa sesaat untuk menghilangkan atau bahkan memusnahkan ASET negara ini dalam jangka panjang sekaligus menambah permasalahan lingkungan yang ada? Jawaban pasti terletak pada atau berpulang pada; kebijakan politik pemerintah, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan reaksi serta kepedulian dunia terhadap masalah lingkungan hidup. Diperlukan suatu kalkulasi ekonomi yang sangat hati-hati dalam konteks ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Soemitro, 1992. Aspek Ekonomi Pengusahaan Hutan, Seminar Nasional, APhi dan Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Bowes, Michael D. and John V. Krutilla, 2002. Multile-Use Management; The Economics of Public Forestlands. Resource for the Future, Washington, DC.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 2000. Data Statistik Kehutanan dan Perkebunan. Setjen Dephut, Jakarta.
- Gregory, G. Robinson, 2001. Forest Resource Economics. John Wiley & Sons, New York.
- Sudradjat DP, Ketua Umum MPI, 2001. Prospek Globalisasi Kehutanan di Abad 21. Laporan MPI, Jakarta.
- UNCED, 1992. Principles of Forest Management, Earth Summit, Rio de Janeiro.
- Untung Iskandar, 2002. Potret Hutan Indonesia, BPK, Departemen Kehutanan, Jakarta.